

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Media massa merupakan istilah yang digunakan semenjak tahun 1920-an mengenai penyebutan jenis media yang mencakup masyarakat secara luas. Menurut etimologi, kata “media” berakar dari kata jamak yang berbahasa latin yakni “medius” kemudian menjadi “medium” yang dapat diartikan “sedang” atau “antara”. Oleh sebab itu media dapat dijabarkan sebagai sesuatu yang mengantar atau meneruskan informasi antara pemberi dan penerima pesan. Media juga bisa dimaknai sebagai suatu bentuk atau wadah yang dapat dipergunakan dalam proses penyajian suatu informasi.

Pers bermula dari Bahasa Belanda dimana dalam Bahasa Inggris mempunyai arti *Press*. Menurut etimologi berarti cetak sedangkan berdasarkan terminologi yakni penyiaran secara tercetak (media cetak) atau dipublikasi.<sup>1</sup> Pers mencakup semua media komunikasi massa yang didalamnya memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan tertulis maupun dengan kata-kata lisan.

Pers merupakan media publik yang dalam isinya memuat perihal beberapa informasi, pemikiran dan opini. Perkembangan pers di Hindia Belanda telah dimulai pada masa *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di Hindia Belanda. Jan Pieterszoon Coen yakni seorang gubernur VOC pertama mengintruksikan untuk menerbitkan surat kabar *Memorie der Nouvelles pada tahun 1615*. Surat kabar *Memorie der Nouvelles* tersebut berbentuk tulisan tangan, sesuai dengan masanya pada saat itu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dahlan Surbakti, “Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya”, *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5.1 (2015), 77–86.

<sup>2</sup> Asep Halimi, Skripsi: “Suara Politik Pers Medan Prijaji: Kajian Terhadap Tulisan RM Tirto Adhisoerjo Tahun 1909-1910” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)

Pada abad ke-17 mesin cetak pertama kali didatangkan ke Hindia Belanda oleh VOC untuk keperluan administrasi. Kemudian pada masa Gubernur Jendral Van Imhoff tahun 1744 mesin cetak dipakai untuk keperluan penerbitan surat kabar. Keberadaan mesin cetak tersebut memiliki peran terhadap surat kabar sebab tidak perlu menggunakan tulis tangan lagi seperti sebelumnya.

Di tahun 1744 tersebut juga resmi terbit surat kabar pertama Hindia Belanda yakni *Bataviasche Nouvelles* tepat pada tanggal 7 November 1744.<sup>3</sup> Surat kabar lain yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda yakni *De Locomotief* pada tahun 1852 dan *Bataviaasch Nieuwsblad* pada tahun 1885 berbahasa Belanda.<sup>4</sup> Selain itu dari tahun ke tahun lahir berbagai surat kabar dari golongan pribumi yang menerapkan Bahasa Melayu ataupun Bahasa lokal yang berasal dari macam-macam daerah di Hindia Belanda seperti tahun 1855 terbit surat kabar *Bromartani* di Solo, tahun 1894 terbit *Pewartar Hindia* di Bandung, dan disusul dengan terbitnya *Tjahaja Soematra* pada tahun 1897 di Sumatra Barat.<sup>5</sup>

Dunia pers semakin menggelora pada tahun 1907 saat terbitnya “Medan Prijaji” dan sejak tahun 1910 sebagai harian. Medan Priyayi merupakan surat kabar pertama yang dikelola oleh golongan pribumi. Kemunculan Medan Priyayi dapat dikatakan sebagai masa cikal-bakal bangsa Indonesia menerjang dunia pers yang bernafaskan politik. *Inheemsche Pers* atau Pers Bumiputra ialah sebutan yang sering dikatakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Medan Priyayi juga dinilai sebagai pelopor pers masa pergerakan nasional.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> I N Soebagijo, *Sejarah Pers Indonesia*, (Jakarta: Dewan Pers, 1977)

<sup>4</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional*. (Gramedia, 1993).

<sup>5</sup> Marwati Djoened Poesponegoro and Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai ..., 1984), vi

<sup>6</sup> Bodewyn Grey Talumewo, “Perkembangan Pers Minahasa Pada Masa Kolonial Tahun 1869-1942”, *JURNAL ELEKTRONIK FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS SAM RATULANGI*, 3.1 (2015).

Adanya pelaksanaan politik etis oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad 20 dilaksanakan bukan tanpa alasan, melainkan sebagai adanya hutang balas budi terhadap pribumi. Belanda menganggap memiliki tanggung jawab moral atas tanah jajahannya oleh sebab itu harus menilik kepentingan pribumi dan memajukan rakyat jajahannya dengan kebijakan politik etis.<sup>7</sup> Tiga program politik etis yakni imigrasi, edukasi dan irigasi. Munculnya program edukasi merupakan titik awal yang menjadi cikal-bakal lahirnya kaum intelektual dari kalangan pribumi. Penderitaan yang dirasakan oleh kaum pribumi menjadi alasan untuk melakukan suatu gerak perubahan melaksanakan perlawanan terhadap kolonial Belanda melalui bentuk pergerakan-pergerakan yang memperjuangkan nasib bangsa sendiri berlandaskan rasa nasionalisme.

Salah satu usaha kaum intelektual pribumi yakni melangsungkan pergerakan terhadap kolonial Belanda. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan beberapa organisasi atau himpunan yang menjadi alat perjuangan guna memajukan kaum pribumi. Pada awalnya dengan terbentuknya Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Setelah itu menyusul beberapa organisasi pergerakan lain seperti *Indische Partij* dan Sarekat Islam. Para organisasi bentukan bangsa Indonesia tersebut tersusun rapi siasat agar terwujudnya harapan untuk meningkatkan derajat bangsa.<sup>8</sup>

Di samping pergerakan yang bersifat nasional, terdapat juga pergerakan yang sifatnya regional atau kedaerahan. Adanya beban yang dirasakan, membuat orang Sunda bangkit dan menggelorakan semangat. Beragam organisasi kesundaan didirikan demi tercapainya maksud dan tujuan yang hendak dicapai yakni guna mengubah nasib dan

---

<sup>7</sup> A Dardiri, "Nasionalisme Dalam Konteks Sejarah", *Jurnal Filsafat*, 1.1 (1994), 14-18

<sup>8</sup> Agus Susilo dan Isbandiyah Isbandiyah, "Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia", *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6.2 (2018), 403.

memperjuangkan cita-cita orang sunda. Selaras dengan hal itu baik golongan muda ataupun golongan tua masing-masing mendirikan organisasi. Beberapa diantaranya lahir organisasi kasundaan seperti Pangauban Sunda, Daya Sunda, Sunda Budaya, Daya Mahasiswa Sunda, Nonoman Sunda, dan Katut Putra Sunda. Untuk menghindari rasa individualistis ragam organisasi kasundaan dipersatukan dalam suatu organisasi yang dinamakan Badan Musyawarah Sunda bagi golongan tua. Sedangkan bagi golongan pemuda terhimpun dalam suatu organisasi yang disebut Front Pemuda Sunda.

Badan Musyawarah Sunda menjadi penerus cita-cita masyarakat Sunda yang telah ada sejak berdirinya organisasi Paguyuban Sunda Daya Sunda pada tahun 1952.<sup>9</sup> Badan Musyawarah Sunda (BMS) telah benar-benar berusaha untuk menyatukan masyarakat sunda dari berbagai perbedaan faham. Etnis Sunda tak lepas dari perasaan sentimen dan antipati layaknya suku-suku lain di Indonesia. Pasca Indonesia merdeka tepatnya tahun 1950-an perasaan sentimen tersebut tidak hilang sebab adanya kebijakan kepegawaian yang dibentuk berdasarkan kategori *non* dan *co*. Segenap kepala pegawai pemerintahan di wilayah Jawa Barat secara tiba-tiba diganti oleh pemerintah pusat dengan orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Latar belakang diadakannya pergantian tersebut sebab orang Sunda yang menjabat kepala pegawai pemerintahan dianggap kelompok orang yang *co-operation* terhadap pemerintah Belanda dan dituduh sebagai pengkhianat bangsa.<sup>10</sup>

Serupa dengan pergerakan nasional, pers pun tidak hanya yang bersifat nasional melainkan terdapat juga pers lokal. Pers lokal merupakan pers berbahasa Sunda di mana dibangun oleh dan untuk lokal. Konteks

<sup>9</sup> Nani Darmayanti, Rosaria Mita Amalia, dan Yuyu Yohana Risagarniwa, "Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Dalam Pelestarian Bahasa, Sastra, Dan Aksara Sunda: Suatu Kajian Perencanaan Bahasa", *repository kemdikbud* (2018)

<sup>10</sup> Vika Chorienti, Skripsi: "*Kongres Pemuda Sunda di Bandung 1956 (Sejarah Mentalitas Masyarakat Sunda)*" (Surabaya: Universitas Airlangga, 2007).

lokal yang dimaksud dimaknai sebagai Kota, Kabupaten, dan Provinsi.<sup>11</sup> Dalam kongresnya yang pertama kali diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23-26 Maret 1957, Badan Musyawarah Sunda menghasilkan beberapa keputusan satu diantaranya yakni melahirkan “Madjalah Simpaj”. Majalah tersebut merupakan tempat untuk mengeluarkan suara dan usaha-usaha Badan Musyawarah Sunda. Bahasa yang digunakan dalam majalah yakni Bahasa Sunda. Di samping tujuan yang telah disebutkan di atas majalah ini juga bermaksud untuk mengembangkan kesusastraan sunda dalam rangka melestarikan dan mengembangkan Bahasa dan Sastra Sunda.

Berbeda dengan majalah lainnya yang terbit di masa itu yang mana konteks isinya lebih banyak mengarah perihal kebudayaan, “Madjalah Simpaj” menggunakan Bahasa Sunda yang berisikan berbagai informasi yang beragam seperti isu politik, kebudayaan, keagamaan, dan keadaan masyarakat sunda pada tahun 1950-an.

Melalui analisis pemberitaan pada Majalah Simpaj dapat dilihat bagaimana media massa pada masa itu menyajikan informasi tentang Badan Musyawarah Sunda kepada masyarakat. Awal dekade 1950-an merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan. Pemberitaan Badan Musyawarah Sunda dalam Majalah Simpaj pada periode tersebut sangat esensial sebab memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial, politik, dan kultural di wilayah Sunda. Hal ini cukup menarik untuk diteliti sebab penelitian terhadap Majalah Simpaj belum ada yang meneliti dan juga pembahasan mengenai organisasi Badan Musyawarah Sunda bisa dikatakan masih sedikit. Nampaknya organisasi ini tidak sepopuler organisasi lain pada masa pergerakan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis pun

---

<sup>11</sup> Parulian Sitompul dan Dida Dirgahayu, “Kepuasan Masyarakat Terhadap Pers Berbahasa Sunda”, *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17.1 (2014).

melakukan penelitian dan pembahasan untuk mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “*Analisis Pemberitaan Badan Musyawarah Sunda dalam Majalah Simpaj Tahun 1956-1958*”. Mengapa hanya 2 tahun ? hal ini dikarenakan majalah yang ditemukan penulis hanya yang diterbitkan antara tahun 1956-1958. Meskipun begitu, dalam rentang waktu dua tahun ini majalah ini telah banyak mendeskripsikan kondisi Badan Musyawarah Sunda pada masa itu. Selain dari itu, majalah ini menjadi suatu terobosan baru bagi organisasi kesundaan dalam sejarah pada masa liberal.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Badan Musyawarah Sunda?
2. Bagaimana Profil Majalah *Simpaj* dan isi rubrik-rubriknya?
3. Bagaimana dampak Badan Musyawarah Sunda dan Majalah *Simpaj* terhadap perkembangan budaya Sunda?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan latar belakang lahirnya Badan Musyawarah Sunda?
2. Untuk menjelaskan profil Majalah *Simpaj* dan isi rubrik-rubriknya?
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak Badan Musyawarah Sunda dan Majalah *Simpaj* terhadap perkembangan Budaya Sunda?

#### **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka, sangat penting untuk penyusun demi melengkapi sumber-sumber yang hendak disusun untuk penelitian ini. Kajian pustaka dilaksanakan guna mencari sumber informasi, seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal atau karya ilmiah, surat kabar online, dokumen, dan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Meskipun penyusun masih kesulitan untuk menemukan sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian ini. Hal ini mungkin terjadi sebab topik yang disajikan oleh penulis belum banyak diteliti oleh masyarakat umum.

Pada sub-bab ini penulis hendak memaparkan tinjauan atas beberapa penelitian ilmiah sebelumnya serta beberapa konsep yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Untuk mendukung penelitian yang berjudul ***“ANALISIS PEMBERITAAN BADAN MUSYAWARAH SUNDA DALAM MAJALAH SIMPAJ TAHUN 1956-1958”***, maka penulis melaksanakan penelitian sebelumnya yang memiliki keserupaan dengan tema yang diangkat penulis. Tinjauan pustaka sangat dibutuhkan guna membandingkan hasil-hasil penelitian yang didapat peneliti sebelumnya, dan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan.

Kajian Pustaka juga berguna dalam mempertajam analisis melalui membandingkan konsep-konsep dalam buku-buku tersebut dengan karya-karya lain dan data yang sesuai dengan tema penelitian ini.

*Pertama*, yakni penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sania Afifah Nuraisyah dengan judul *“Sejarah Pergerakan Perkumpulan Sekar Roekoen di Indonesia Tahun 1919-1929”* yang memaparkan mengenai organisasi pergerakan perkumpulan Sekar Roekoen yakni suatu organisasi kasundaan. Meliputi latar belakang berdirinya organisasi tersebut, kemudian bagaimana peran dalam kongres pemuda I dan II, sampai bagaimana organisasi pergerakan perkumpulan Sekar Roekoen tersebut mengeluarkan surat kabar Sekar Roekoen.

*Kedua*, yakni sebuah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Azkiyatul Lutfiyah dengan judul *“Peran Koran Suara Merdeka terhadap Gerakan Mahasiswa di Semarang Tahun 1998”* yang menjelaskan mengenai surat kabar Suara Merdeka, di mana pada saat itu merupakan surat kabar terbesar yang ada di Semarang tepatnya pada tahun 1950-an. Di dalamnya terdapat pembahasan yang meliputi keadaan pers di Semarang pada tahun tersebut dan bagaimana surat kabar berperan terhadap pemberitaan isu-isu politik mengenai setiap perkumpulan gerakan mahasiswa. Hal ini menggambarkan bahwa pers dapat memiliki peran dan keterkaitan dengan dunia politik.

## E. Metode Penelitian

Sejarah sebagai kajian ilmu tentu memiliki metodologi dalam tahapan perkembangan ilmunya oleh sebab itu memiliki sifat yang empiris dan memiliki objek kajian pada hakikatnya peradaban manusia itu sendiri serta dalam penelitian memiliki langkah-langkah penelitian.<sup>12</sup> Dalam Metode penelitian sejarah yang dipaparkan oleh Kuntowijoyo ada lima langkah yang harus dilaksanakan. Yang pertama yakni pemilihan topik penelitian, tahap kedua yakni pengumpulan sumber/heuristik, yang ketiga yakni melibatkan verifikasi atau kritik terhadap sumber-sumber tersebut, tahap keempat yakni interpretasi, dan kelima adalah penulisan atau historiografi. Setelah menetapkan topik penelitian, penulis melanjutkan dengan melaksanakan empat tahap berikutnya, yakni sebagai berikut :

### 1. Heuristik

Tahap awal yang penulis lakukan dalam penelitian ini yakni tahapan heuristik. Langkah ini merupakan cara kerja penulis untuk memperoleh, menemukan, dan mengumpulkan sumber dengan memberikan klasifikasi terhadap sumber yang telah penulis peroleh di lapangan.<sup>13</sup> Heuristik atau proses pengumpulan sumber adalah langkah untuk mencari dan mengumpulkan berbagai sumber informasi guna memperoleh data yang relevan dan dapat digunakan dalam penelitian sejarah.<sup>14</sup> Sumber - sumber yang didapatkan ini diharapkan bisa dijadikan sebagai alat bahan penulisan. Selain itu, seseorang harus mempunyai sumber terlebih dahulu untuk bisa menulis sebuah peristiwa sejarah.

Berdasarkan sifatnya, sumber-sumber sejarah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan informasi yang berasal langsung dari kesaksian individu yang mengalami peristiwa tersebut atau orang yang terlibat

---

<sup>12</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003).

<sup>13</sup> Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta : Ombak, 2016)

<sup>14</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2014)

secara langsung dalam peristiwa tersebut. Sumber ini juga bisa berupa rekaman mekanis yang dibuat pada saat peristiwa berlangsung dan berasal dari masa yang sama dengan peristiwa tersebut.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber primer seperti surat majalah, dan buku. sementara itu, sumber sekunder adalah informasi yang berasal dari analisis, ringkasan, atau penafsiran orang lain terhadap peristiwa sejarah. Sumber- sumber sekunder ini termasuk buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan sumber terkait lainnya. Dalam sub bab ini, penulis hanya akan mencantumkan beberapa sumber sekunder yang relevan dalam penelitian ini. Beberapa sumber tersebut adalah sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Majalah *Simpaj* yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Sunda Tahun 1957-1958, yang terdiri dari :

- 1) Th.1 No.1
- 2) Th 1 No 3/ 4
- 3) Th.1 No.5
- 4) Th.2 No.6
- 5) Th.2 No.8
- 6) Th.2 No.9

b. Sumber Sekunder

1) Buku

- a) Iwa Kusuma Soemantri *Sang Pejuang dalam Gejolak Sejarah (autobiografi)*, Bandung: Satya Historika , 2002
- b) Edi S.Ekadjati *Nu Maranggung dina Sajarah Sunda*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- c) Nina Herlina Lubis, *Sejarah Wilayah Sunda*, Bandung: Lembaga Penelitian UNPAD, 2003

---

<sup>15</sup> *ibid*

- a) Ajip Rosidi, *Ensiklopedia Sunda*, Jakarta: Pustaka Jaya, 2004
- b) Nina Herlina Lubis, *Tradisi dan Transformasi Sejarah Sunda*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2000
- c) Suwarsih Warnaen, *Pandangan Hidup Orang Sunda : Seperti Tercermin dalam Tradisi Lisan dan Sastra Sunda*, Bandung: Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sunda Depdikbud, 1987.

## 2) Skripsi

- a) Vika Chorianti, “Kongre Pemuda Sunda di Bandung 1956”. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2006)
- b) Sania afifah Nuraisyah “Sejarah Pergerakan Perkumpulan Sekar Roekoen di Indonesia Tahun 1919-1929”. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)

## 3) Jurnal

- a) A.A Bagus Wirawan, “Respon Lokal terhadap Revolusi Indonesia di Sunda Kecil Tahun 1945-1950”. *Jurnal Humaniora* (2008)
- b) Mohammad Refi Omar Ar Razy “Perkumpulan Sekar Rukun: Perjuangan Pemuda Sunda Masa Pergerakan Nasional (1919-1931)”. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah* (2021)

## 2. Kritik

Setelah sumber-sumber dikumpulkan, tahapan berikutnya yakni tahapan kritik atau verifikasi terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut ditelaah validitasnya, diverifikasi, dan diuji

keotentikannya, akurasi serta ketepatannya.<sup>16</sup>

Kritik atau verifikasi adalah tahap kedua yang dilaksanakan sesudah terhimpun sumber-sumber guna menentukan kredibilitas terhadap sumber yang didapatkan melalui kualifikasi terhadap bentuk, jenis dan bahan sumber yang lebih lanjut dapat menentukan bagaimana keabsahan teks dan isi dari data-data. Kritik merupakan sebuah usaha menganalisa atau penilaian, memilah-milih terhadap sumber sejarah agar dapat menetapkan kevalidannya atau bisa juga diartikan sebagai tahap pemeriksaan terhadap kesesuaian laporan perihal suatu peristiwa sejarah. Pada tahap ini, dilaksanakan sebuah penyeleksian apakah data yang didapat tersebut akurat atau tidak, dinilai dari segi bentuk ataupun isinya sehingga bisa dipertanggungjawabkan.<sup>17</sup> Di dalam Kritik terdapat dua aspek yakni kritik luar (external criticism) dan kritik dalam (internal criticism).

#### **a. Kritik Ekstern**

Kritik eksternal yakni sebuah usaha yang dilakukan untuk memverifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah yakni berkaitan dengan berbagai hal, seperti memastikan validitas sumber sejarah, jenis tulisan dan kertas, menentukan pribadi penulis dan tempat serta waktu penulisan. Untuk dapat memastikan sumber tersebut valid atau tidaknya bisa dilaksanakan melalui tiga pertanyaan berikut.<sup>18</sup> Pertanyaan pertama, *apakah sumber tersebut merupakan sumber yang kita butuhkan ?* Berdasarkan pertanyaan ini, sumber - sumber primer yang

---

<sup>16</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

<sup>17</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

<sup>18</sup> Madjid M Dien and Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2014).

didapatkan penulis merupakan sumber yang dibutuhkan penulis. Sumber pertama, majalah Simpaj, sumber ini merupakan sumber yang penulis amat butuhkan sebab melalui sumber ini penulis dapat mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Badan Musyawarah Sunda.

Pertanyaan Kedua, *apakah sumber tersebut asli atau salinan?* Semua sumber yang telah penulis dapat adalah asli dan bukan salinan. Pertanyaan ketiga, *apakah sumber itu masih utuh atau sudah mengalami perubahan?* Semua sumber primer yang penulis dapatkan masih utuh dan belum mengalami perubahan bentuk. Sumber primer pertama, majalah simpaj yang penulis dapatkan belum mengalami perubahan bentuk.

#### **b. Kritik Intern**

Kritik intern biasa disebut sebagai usaha pengujian kredibilitas sumber. Hal ini dapat dimaknai apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Dalam penelitian ini, sumber media cetak majalah Simpaj dapat dipercaya sebab media cetak tersebut merupakan media cetak yang diterbitkan langsung oleh organisasi Badan Musyawarah Sunda.

Adapun terhadap sumber-sumber lainnya, penulis dapat mengatakan bahwa sumber yang tercantum dalam skripsi ini dapat dikategorikan kredibel atau terpercaya. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan buku atau jurnal yang merupakan sumber terpercaya sebab merupakan karya ilmiah. Dalam prosesnya, baik buku ataupun jurnal terdapat tahapan-tahapan yang hendak dipenuhi sebagai syarat agar dapat dikategorikan karya ilmiah

### 3. Interpretasi

Setelah melaksanakan kritik atau verifikasi sumber, kemudian tahapan selanjutnya adalah interpretasi. Tahap interpretasi dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni interpretasi sintesis dan interpretasi analisis. Interpretasi analisis merupakan sebuah usaha untuk menguraikan fakta satu per satu. Sedangkan interpretasi sintesis merupakan usaha untuk mengumpulkan atau menghimpun beberapa fakta serta menarik kesimpulan dari fakta tersebut.<sup>19</sup>

Pada tahapan ini, penulis mencoba mencari dan menguraikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Musyawarah Sunda yang tercantum dalam media cetak yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Sunda sendiri. Dari hasil uraian tersebut, kemudian penulis mencoba menghubungkan dengan berita atau informasi yang terdapat pada sumber primer lainnya. Hal ini bertujuan agar beberapa fakta yang telah dipadukan dari berbagai sumber primer nantinya akan dihasilkan sebuah fakta baru.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep organisasi sosial dalam ilmu bantu Sosiologi. Menurut Dirdjosisworo organisasi sosial merupakan suatu wadah pergaulan kelompok yang disusun secara jelas antara para petugas dan tugasnya berkaitan dengan usaha untuk mencapai suatu tujuan, yang berkaitan dengan keamanan anggota. Menurut Amitai Etzioni memaparkan bahwa organisasi sosial merupakan kesatuan sosial berbentuk kelompok secara sengaja dibentuk dan memiliki tujuan tertentu. Terdapat beberapa karakteristik organisasi yang bisa dirinci juga sebagai lembaga sosial yang terdiri atas sekelompok orang yang berinteraksi, serta ditumbuhkan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Madjid M.dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014)

<sup>20</sup> Armeini Uha Satari, *Pengertian Dan Tujuan Serta Tipe Dan Struktur Organisasi Sosial*, (Banten: 2008)

Organisasi sosial dapat dikategorikan ke dalam bentuk formal dan informal. Organisasi formal menghimpun ciri-ciri berikut yakni terstruktur, terumuskan, kaku, dan tahan lama. Sementara itu organisasi informal memiliki karakteristik fleksibel, lepas, spontan dan tidak terumuskan. Selain dari dua jenis kategori yang sudah disebutkan di atas, organisasi sosial juga dapat diklasifikasikan menjadi bentuk primer dan sekunder atau berlandaskan keterlibatan emosional antar anggotanya. Organisasi primer dapat ditunjukkan dengan adanya hubungan yang bersifat pribadi, spontan, langsung, dan tatap muka. Sedangkan organisasi sekunder memiliki ciri khas hubungan yang bersifat intelektual, kontraktual dan rasional. Di samping itu organisasi sosial dapat dikategorikan berdasarkan sasaran, seperti organisasi pelayanan, organisasi religius, organisasi ekonomi, organisasi perlindungan, organisasi sosial dan organisasi pemerintah.<sup>21</sup>

Berlandaskan konsep tersebut, Badan Musyawarah Sunda merupakan sebuah organisasi sosial yang tersusun dari sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama. Badan Musyawarah Sunda juga merupakan perkumpulan yang secara sengaja dibentuk penuh kesadaran oleh beberapa tokoh kesundaan terhormat yang memiliki kesadaran terhadap suasana genting masyarakat sunda saat itu dan adanya kesamaan budaya, yakni budaya Sunda. Tujuan Badan Musyawarah Sunda secara jelas dicantumkan dalam anggaran dasar yang terdapat dalam media cetaknya. Di samping itu, sebagaimana organisasi sosial yang lain, Badan Musyawarah Sunda didirikan dengan anggota yang mempunyai hak dan kewajiban yang jelas, yang telah diatur dalam sistem hierarki seperti mana organisasi pada umumnya.

Sehubungan bentuknya, Badan Musyawarah Sunda termasuk

---

<sup>21</sup> *ibid*

dalam golongan organisasi formal. Organisasi formal mempunyai struktur yang merealisasikan hubungan otoritas dan tanggung jawab. Selain itu organisasi formal juga memiliki penjabaran tugas yang spesifik terhadap setiap anggotanya. Dalam organisasi Badan Musyawarah Sunda, kegiatan dilaksanakan berdasarkan sistem hierarki seperti ketua, bendahara, sekretaris dan sebagainya. Sistem yang ada tersebut menciptakan adanya batasan dan kejelasan tugas terhadap antar anggota. Kemudian berdasarkan sasarannya, Badan Musyawarah Sunda tersimpul ke dalam organisasi sosial.

Dalam kronologis kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 1956-1958 dalam majalah lokal Indonesia, penulis menginterpretasikan dengan beberapa teori pendekatan yang relevan. Yaitu dengan menggunakan teori komunikasi massa, pada kajian penelitian komunikasi yang dilaksanakan tidak terfokus perhatiannya terhadap metode ilmiah sebagaimana yang biasa dijadikan titik acuan sebuah ilmu dikatakan ilmiah. Komunikasi massa memiliki titik fokus dan pembahasan yang mandiri. Misalnya, dalam bukunya *Introduction of Mass Communication Research* Wilbur Schramm menginterpretasikan beberapa penelitian yang dilaksanakan pada tahun 1920 dan 1930-an yang memfokuskan perhatiannya pada analisis sejarah majalah dan surat kabar atau deskripsi interpretasi pean media. Bahkan dalam jurnal ilmiah tertua komunikasi *Journalism Quarterly* dipaparkan bahwa wilayah kajian jurnalistik dan komunikasi massa dapat difokuskan pada sejarah, analisis media, dan hukum.<sup>22</sup>

Dalam teori informasi melalui pendekatan komunikasi massa dan pendekatan analisis wacana. Definisi yang merujuk pada perkembangan teori informasi (*information theory*) merupakan pemahaman bahwa ‘semua proses yang bisa dikatakan mentransfer

---

<sup>22</sup> Msi.Nuruddin, *Pengantar Komunikasi Massa*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

informasi pada hakikatnya adalah proses seleksi'. Umumnya teori ini lebih diaplikasikan pada jenis kajian informatif sebagai contohnya berita.<sup>23</sup>

#### 4. Historiografi

Setelah melaksanakan tahapan heuristik, kritik, dan interpretasi, selanjutnya adalah langkah historiografi atau tahap penulisan sejarah. Historiografi bermula dari kata hitoria yang berarti penyelidikan terkait gejala alam, tulisan, gambar, ataupun uraian.<sup>24</sup> Secara luas historiografi dapat diartikan sebagai pengkajian kronologis tingkah laku manusia pada masa lalu, atau pengkajian terkait penulisan sejarah. Historiografi dapat dimaknai sebagai kegiatan merangkai fakta dengan maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah.<sup>25</sup> Historiografi ialah langkah final dari metode penelitian sejarah. Tujuan utama historiografi yakni guna merekonstruksi sejarah. Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang memiliki tujuan guna menganalisa sumber-sumber yang sudah didapatkan. Selepas itu hasil dari analisis dideskripsikan atau diuraikan melalui susunan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian sejarah dengan tahapan yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

BAB II berisi tentang Latar belakang lahirnya Badan Musyawarah Sunda, di mulai dengan perkembangan pers di Indonesia, kemudian membahas gambaran umum masyarakat Sunda pada tahun 1950- an, yang di awali dengan penjelasan mengenai sejarah perjuangan

---

<sup>23</sup> Denis Mc Quail. *Teori Komunikasi Massa*. (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika). hlm.90

<sup>24</sup> Wahyu Iryana, *Historiografi Islam*, (Prenada Media, 2021)

<sup>25</sup> Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)

kedaerahan masyarakat Sunda sampai lahirnya organisasi Badan Musyawarah Sunda yang dapat menciptakan majalah *Simpaj*.

BAB III merupakan bagian isi atau pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari bahasan mengenai latar belakang lahirnya Majalah *Simpaj*, peran Badan Musyawarah Sunda dalam Majalah *Simpaj* tahun 1956-1958, analisis pemberitaan Badan Musyawarah Sunda dalam Majalah *Simpaj* tahun 1956-1958, serta dampak Badan Musyawarah Sunda dan Majalah *Simpaj* terhadap perkembangan budaya Sunda.

BAB IV ialah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan juga saran mengenai penelitian ini.

